



Upaya Meningkatkan Pemahaman Toleransi Siswa Melalui Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Berbasis Isu Multikultural pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Kelas XI SMAN 1 Sidemen

Agung Kurniawan¹, Nur Wahyu Rochmadi², Didik Sukriono³, Siti Awaliyah⁴

¹²³⁴ Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang

Corresponding Author: agung.kurniawan.2507128@students.um.ac.id

Article History:

Received: 12-05-2026

Revised: 25-06-2026

Accepted: 19-06-2026

Keywords:

Problem Based Learning,
Local Multicultural
Issues, Tolerance
Understanding, Civic
Knowledge, Pancasila
Education.

Abstract: *Understanding tolerance cannot be formed solely through one-way value transmission; rather, it requires a learning process that engages students in critical reasoning toward the reality of social plurality. This activity was implemented as an effort to strengthen students' understanding of tolerance through the application of a Problem Based Learning (PBL) model based on local multicultural issues in Civic Education learning in class XI B of SMAN 1 Sidemen. The activity aimed to improve students' tolerance understanding (civic knowledge) through a pedagogical intervention grounded in socio-cultural problems closely related to students' daily lives. The implementation of this activity used a Classroom Action Research (CAR) design based on the spiral model of Kemmis and McTaggart, conducted in two participatory-reflective cycles. Quantitative data were collected using an essay-based cognitive test instrument with a rubric scale covering indicators C2–C5, while qualitative data were obtained through observation sheets of learning syntax implementation. The results of the activity show that exposure to ill-structured problems derived from local social dynamics, such as local–migrant relations and the sensitivity of the caste stratification system, was able to trigger cognitive dissonance, which contributed to the improvement of students' reasoning quality. This is evidenced by an increase in the average learning outcomes from 58.12 in the Pre-Cycle stage to 72.50 in Cycle I, and reaching 83.15 in Cycle II. The classical completeness percentage also increased from 43.75% to 87.50%, exceeding the predetermined success indicator of $\geq 80\%$. Overall, the implementation of a PBL model based on local multicultural issues proved effective in dismantling learning misconceptions, reducing cultural bias, and shifting students' learning orientation from textual memorization toward analytical thinking and problem-solving skills grounded in Pancasila values..*

© 2026 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila di jenjang Sekolah Menengah Atas memikul mandat konstitusional dan tanggung jawab pedagogis yang sangat berat. Mata pelajaran ini tidak sekadar bertugas mentransfer pengetahuan faktual, tetapi harus mampu membentuk warga negara yang cerdas secara intelektual, demokratis, serta mampu hidup berdampingan

secara harmonis dalam tatanan masyarakat yang sangat majemuk. Tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas memprioritaskan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks kebangsaan Indonesia yang dihuni oleh lebih dari 1.300 kelompok etnik dengan keberagaman agama, bahasa, dan tradisi, nilai-nilai tersebut secara substantif bertautan langsung dengan penguatan pemahaman toleransi sebagai pilar literasi kewarganegaraan.

Di dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, toleransi tidak boleh hanya dipandang sebagai watak afektif bawaan (*civic disposition*), melainkan harus ditopang kuat oleh struktur pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). *Civic knowledge* mencakup pemahaman kritis terhadap realitas keberagaman budaya, batas-batas hak kebebasan berekspresi, serta keterampilan resolusi konflik demokrasi. Budimansyah (2010) menegaskan bahwa keberhasilan literasi kebangsaan mensyaratkan pemahaman konsep kognitif yang kokoh agar peserta didik memiliki "jangkar" intelektual, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi sentimen publik yang destruktif dan memecah belah.

Namun, realitas empiris di tingkat nasional justru menampilkan kondisi yang kontradiktif. Laporan riset dari Setara Institute (2023) mengungkap data krusial bahwa 24,2% siswa SMA di Indonesia masih berada pada kategori intoleran pasif, sementara 5% lainnya berada pada spektrum intoleran aktif. Temuan ini diiringi oleh hasil penelitian PPIM UIN Jakarta (2022) yang menemukan dominasi cara pandang eksklusif di kalangan pelajar akibat absennya kemampuan berpikir kritis dalam merespons doktrin yang tertutup. Berbagai penelitian terdahulu mengonfirmasi bahwa akar dari fenomena ini adalah rendahnya mutu proses instruksional di ruang kelas. Widiatmaka dan Pangalila (2022) menemukan bahwa eksekusi pembelajaran Pancasila sering kali masih terjebak pada capaian kognitif tingkat rendah (*Low Order Thinking Skills / LOTS*), yang berorientasi pada hafalan (C1-C2). Senada dengan hal tersebut, Lestari, dkk. (2023) mengungkapkan bahwa siswa umumnya mampu menghafal definisi toleransi secara tekstual demi perolehan nilai di atas kertas, namun seketika mengalami kebuntuan analisis manakala dihadapkan pada studi kasus riil mengenai persekusi dan prasangka budaya.

Kesenjangan struktural antara target kurikulum normatif dan pencapaian kognitif faktual tersebut terekam secara nyata di kelas XI B SMAN 1 Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Wilayah Sidemen secara sosiologis dan demografis diwarnai oleh interaksi intensif antara penganut tradisi kebudayaan lokal Bali dan gelombang mobilitas warga pendatang. Di samping dinamika lokal-pendatang tersebut, masyarakat Bali secara kultural mewarisi hierarki stratifikasi sosial yang dikenal sebagai sistem wangsa (*kasta*). Meskipun regulasi sekolah formal menjamin egalitarianisme tanpa kelas, sisa-sisa persepsi hierarkis ini secara diam-diam sering kali memengaruhi konstelasi pergaulan siswa, memicu rasa sungkan (*ewuh pakewuh*) untuk berpendapat di kelas, atau memicu dominasi kelompok dominan tertentu. Ketiadaan instrumen pembelajaran yang berani mengintervensi realitas sosial ini membuat bias prasangka bersemayam tanpa disadari.

Hal ini dibuktikan secara empiris melalui pelaksanaan asesmen diagnostik Pra-Siklus yang dilakukan peneliti pada bulan Januari 2026. Data objektif menunjukkan bahwa rata-rata perolehan nilai tes kognitif pemahaman toleransi dari 32 siswa di kelas XI B hanya menyentuh angka 58,12. Angka ketuntasan klasikal sangat memprihatinkan, yakni hanya 43,75% siswa yang berhasil mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) sebesar 75. Mayoritas siswa mengalami kesulitan parah pada ranah analisis (C4),

khususnya saat diminta membedakan secara logis antara tindakan kebebasan berekspresi dan tindakan diskriminatif yang melanggar nilai kebinekaan.

Untuk membedah kebekuan kognitif ini, intervensi pedagogis berupa pembaruan model pembelajaran mutlak diperlukan. Peneliti, melalui diskusi kolaboratif bersama guru sejawat, sepakat untuk mengimplementasikan model Problem Based Learning (PBL) sebagai sarana intervensi. Menurut Arends (2020), model PBL memiliki sintaks yang secara inheren dirancang untuk membenturkan siswa dengan masalah autentik terbuka (*ill-structured problems*). Pemaparan masalah pelik ini akan menghasilkan disonansi kognitif yang memaksa siswa keluar dari zona nyaman hafalan tekstual dan memasuki ruang penalaran Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Penelitian ini memiliki posisi kebaruan (*novelty*) yang tegas jika dibandingkan dengan literatur sejenis. Sebagian besar penelitian terdahulu (seperti penelitian dari Sari & Murdiono, 2022; Zuhdi & Haryanto, 2020) hanya menguji model PBL menggunakan isu-isu toleransi makro-nasional yang abstrak, serta hanya mengukurnya pada ranah persepsi afektif (sikap) semata. Penelitian tindakan kelas ini secara progresif dan spesifik mengintegrasikan model PBL dengan isu multikultural lokal yang ada di Bali—yakni eksklusivisme lokal-pendatang dan sensitivitas sistem stratifikasi wangsa/kasta.

Penggunaan instrumen masalah lokal ini merujuk pada postulat pendidikan multikultural dari Tilaar (2004) dan Banks (2019), yang menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak akan berhasil tanpa bertolak dari rekonstruksi pengalaman sosiologis terdekat siswa. Atas dasar problematika dan landasan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana proses penerapan serta hasil peningkatan pemahaman toleransi siswa di kelas XI B SMAN 1 Sidemen melalui model Problem Based Learning (PBL) berbasis isu multikultural lokal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dipadukan dalam pelaksanaan program pembelajaran berbasis siklus yang bersifat kolaboratif dan reflektif. Desain kegiatan mengadopsi model spiral yang dikembangkan oleh Kemmis, McTaggart, dan Nixon (2020), yang tersusun atas empat tahapan fundamental pada setiap putaran pelaksanaannya, meliputi: Perencanaan (Planning), Pelaksanaan Tindakan (Acting), Pengamatan (Observing), dan Refleksi (Reflecting).

Kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 1 Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pada semester genap tahun ajaran 2025/2026. Peserta kegiatan adalah siswa kelas XI B yang berjumlah 32 orang. Pemilihan peserta dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa kelas XI B memiliki tingkat pemahaman toleransi yang relatif lebih rendah dibandingkan kelas lainnya berdasarkan hasil asesmen awal. Selain itu, komposisi siswa yang terdiri atas peserta didik lokal dan pendatang dinilai merepresentasikan kondisi heterogenitas sosial budaya yang berkembang di wilayah Sidemen.

Instrumen evaluasi kegiatan dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, untuk mengukur capaian pemahaman toleransi peserta, digunakan Tes Tertulis Esai Berbasis Kasus dengan rubrik penilaian berskala 1–4. Instrumen ini mengukur capaian kognitif berdasarkan revisi Taksonomi Bloom oleh Anderson yang mencakup lima indikator operasional, yaitu:

1. Kemampuan menjelaskan hakikat toleransi (C2).
2. Kemampuan mengidentifikasi tindakan intoleran (C3).
3. Kemampuan menjelaskan signifikansi keberagaman (C3).
4. Kemampuan menganalisis dampak negatif persekusi (C4).

5. Kemampuan mengevaluasi masalah dan merumuskan resolusi berbasis Pancasila (C5).

Sebelum digunakan, instrumen tes telah melalui uji validitas isi (content validity) menggunakan teknik expert judgment oleh ahli materi untuk memastikan kesesuaian indikator, tingkat kesukaran, dan relevansi konseptual terhadap tujuan kegiatan.

Kedua, untuk mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan, digunakan Lembar Observasi Keterlaksanaan Sintaks Problem Based Learning (PBL) dan Catatan Lapangan (Field Notes) yang diisi oleh guru Pendidikan Pancasila sebagai mitra kolaborator. Instrumen ini digunakan untuk memantau keterlaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi peserta, serta berbagai dinamika yang muncul selama program berlangsung.

Teknik evaluasi data memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh melalui lembar observasi dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis ini dimanfaatkan sebagai dasar refleksi untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes peserta dianalisis secara statistik deskriptif untuk mengetahui tren peningkatan nilai rata-rata dan persentase ketercapaian peserta. Rumus persentase ketercapaian peserta yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase Ketuntasan

F = Jumlah siswa tuntas dengan nilai ≥ 75 ;

N = Total jumlah siswa).

Keberhasilan kegiatan ditandai dengan adanya tren peningkatan nilai rata-rata peserta secara konsisten serta minimal 80% dari total peserta berhasil mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP), yaitu memperoleh nilai ≥ 75 pada evaluasi akhir setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan hasil kegiatan disajikan secara sistematis berdasarkan tahapan perkembangan tindakan, mulai dari pemetaan basis data awal di tahap pra-siklus, hingga intervensi pedagogis berjenjang pada Siklus I dan Siklus II.

Kondisi Awal (Pra-Siklus)

Evaluasi tahap awal dilaksanakan melalui serangkaian observasi pasif dan tes diagnostik. Secara instruksional, pembelajaran di kelas XI B berjalan monoton di bawah dominasi metode teacher-centered (ceramah dan penyalinan catatan). Minimnya kehadiran ruang dialogis dan bedah studi kasus membuat siswa menganggap materi Pendidikan Pancasila hanya sebagai hafalan menjelang ujian.

Dari hasil Tes Pemahaman Toleransi Pra-Siklus (berfokus pada masalah kesalahpahaman budaya lokal-pendatang dasar), diperoleh fakta empiris bahwa rata-rata nilai kognitif kelas hanya mencapai 58,12. Dari 32 jumlah total siswa, tercatat hanya 14 siswa (43,75%) yang dinyatakan tuntas dengan perolehan nilai ≥ 75 , sedangkan 18 siswa

lainnya (56,25%) gagal mendeteksi anatomi diskriminasi secara logis (C4). Lemahnya struktur civic knowledge ini mendasari urgensi eksekusi tindakan Siklus I.



Gambar 1. Pelaksanaan siklus 1 di kelas XI B SMAN 1 Sidemen

Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I Perencanaan & Pelaksanaan

Mengacu pada data pra-siklus, peneliti bersama kolaborator menyusun Modul Ajar Siklus I berpendekatan model Problem Based Learning. Pada tahap orientasi masalah, guru memicu disonansi kognitif dengan menyajikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang memuat teks studi kasus berjudul: "Stereotip Etnis dan Konflik di Ruang Digital (Eksklusivisme vs Kolaborasi Budaya)". Kasus ini mendeskripsikan perselisihan antarsiswa di SMAN 1 Sidemen terkait sentimen terhadap asal muasal budaya daerah untuk lomba sekolah.

Guru selanjutnya mengorganisasikan 32 siswa ke dalam 6 kelompok heterogen (Sintaks 2) dan memulai fase pembimbingan penyelidikan (Sintaks 3). Saat melakukan investigasi mandiri dan berdebat dalam kelompok, sebagian besar siswa mulai menyadari betapa berbahayanya jejak digital yang memuat ujaran kebencian. Namun, saat merumuskan solusi dan presentasi (Sintaks 4), argumentasi yang ditawarkan beberapa kelompok masih terlalu emosional dan belum sepenuhnya berpijak pada rasionalitas konstitusional (Sila ke-3 Pancasila).

Observasi & Evaluasi

Catatan kolaborator menunjukkan bahwa tingkat keterlaksanaan sintaks guru di Siklus I berada pada angka 76%. Kendala instruksional utama adalah guru kurang mendistribusikan pancingan analitis (scaffolding) ke seluruh kelompok, sehingga terjadi ketimpangan partisipasi; kelompok tertentu mendominasi kelas, sementara kelompok lain cenderung pasif menyimak. Hasil evaluasi tes kognitif Siklus I menunjukkan eskalasi rata-rata kelas menjadi 72,50, dengan jumlah siswa tuntas naik menjadi 22 orang (68,75%). Meski mengalami lonjakan kognitif, angka ini belum menyentuh indikator keberhasilan minimum 80%.

Refleksi Siklus I

Berdasarkan musyawarah reflektif, disimpulkan bahwa intervensi harus dilanjutkan ke Siklus II (re-planning) dengan perubahan taktik yang ekstrem. Guru harus membedakan kasus multikultural yang tingkat sensitivitasnya jauh lebih tinggi untuk menguras seluruh

kecerdasan analitis siswa, sekaligus mengubah pola pendampingan kelompok menjadi probing yang intensif dari meja ke meja.



Gambar 2. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok heterogen

Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II Perencanaan & Pelaksanaan

Berpijak pada titik lemah di Siklus I, guru merancang instrumen kasus baru yang secara kultural sangat menantang bagi sosiologi masyarakat Bali, yaitu: "Sensitivitas Pelapisan Sosial (Sistem Wangsa/Kasta) dalam Forum Diskusi Akademik" (Sintaks 1). Teks ini menggambarkan dilema nyata di mana seorang siswa dari "kasta biasa" secara intelektual lebih kompeten, namun ditolak berpendapat karena adanya sentimen dominasi siswa dari "wangsa bangsawan" yang merasa lebih berhak bersuara.

Penyajian kasus tabu ini menyulut intensitas kelas secara dramatis. Pada tahap penyelidikan kelompok (Sintaks 3), guru merealisasikan janji perbaikannya. Guru tidak membiarkan siswa menjawab secara normatif. Ketika seorang siswa mengatakan "Hal itu tidak baik", guru melakukan intervensi dengan probing tajam: "Jelaskan secara sosiologis mengapa tradisi dominasi tersebut melanggar egalitarianisme dan mengancam kesehatan mental rekannya di sekolah formal?". Debat pada tahap Menganalisis Pemecahan Masalah (Sintaks 5) menjelma menjadi sangat objektif dan argumentatif.

Observasi & Evaluasi

Instrumen lembar observasi kolaborator mencatat tingkat kepatuhan dan keandalan pelaksanaan sintaks PBL oleh guru mencapai angka 93%. Keseluruhan siswa berpartisipasi menyuarakan perspektifnya, membedah dikotomi antara pelestarian budaya dan bahaya diskriminasi sosial di ranah pendidikan inklusif.

Hasil tes kognitif akhir Siklus II menjadi pembuktian final keberhasilan PTK ini. Perolehan rata-rata kelas meroket hingga menembus angka 83,15. Sebanyak 28 dari 32 siswa berhasil menyabet nilai sangat baik di atas ambang batas KKTP, sehingga persentase ketuntasan klasikal menyentuh 87,50%.

Refleksi Siklus II

Angka ketuntasan paripurna ini secara mutlak menyatakan bahwa indikator keberhasilan PTK ($\geq 80\%$) telah berhasil dilampaui. Disonansi miskonsepsi kognitif siswa telah berhasil didekonstruksi. Penelitian resmi dihentikan.

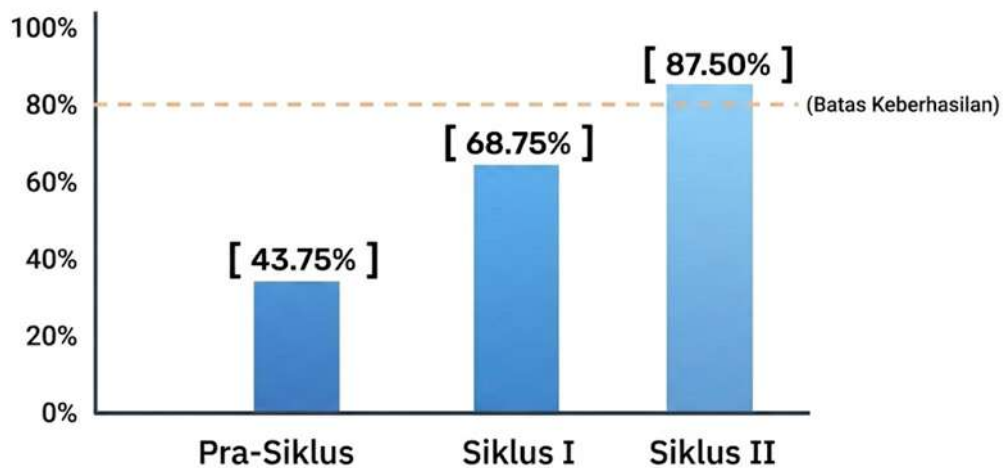
Keberhasilan drastis yang ditunjukkan pada Siklus II bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari konstruksi intervensi pedagogis yang presisi. Dampak dari intervensi tersebut dapat dibuktikan melalui tren rekapitulasi data dari tiga tahapan asesment yang divisualisasikan melalui Tabel 1.

Tabel 1. Tren Rekapitulasi Eskalasi Pemahaman Toleransi (Civic Knowledge)

Indikator Capaian Evaluatif	Pra-Siklus	Siklus I	Siklus II
Jumlah Siswa Mengikuti Tes	32	32	32
Nilai Rata-rata Kelas	58,12	72,50	83,15
Jumlah Siswa Tuntas (≥ 75)	14	22	28
Persentase Ketuntasan Klasikal	43,75%	68,75%	87,50%

Visualisasi peningkatan persentase ketercapaian peserta dari kondisi awal hingga tahap II dapat dilihat pada gambar 3. Pada gambar tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten dan signifikan, yang mengindikasikan keberhasilan program dalam memperkuat pemahaman toleransi peserta pada berbagai level kognitif (C2–C5).

PERSENTASE KEBERHASILAN BERDASARKAN SIKLUS



Gambar 3. Visualisasi Peningkatan Persentase Ketuntasan Klasikal (Level C2-C5)

Peningkatan capaian peserta yang terlihat pada setiap tahapan kegiatan menunjukkan bahwa penguatan pemahaman toleransi tidak hanya dipengaruhi oleh penyampaian materi, tetapi juga oleh strategi pembelajaran yang memberikan ruang bagi peserta untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan merefleksikan pengalaman sosial yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan nilai rata-rata dari 58,12 pada kondisi awal

menjadi 83,15 pada tahap akhir kegiatan memperlihatkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis masalah mampu membantu peserta membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberagaman, toleransi, dan penyelesaian konflik sosial secara konstruktif.

Peran Sintaks Problem Based Learning dalam Membongkar Low Order Thinking Skills (LOTS)

Penerapan sintaks Problem Based Learning (PBL) berperan penting dalam mendorong peserta keluar dari pola berpikir yang selama ini cenderung berorientasi pada hafalan. Selama proses kegiatan, peserta dihadapkan pada berbagai persoalan kontekstual yang menuntut kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan solusi. Kondisi ini secara alami mendorong munculnya ketidakseimbangan kognitif ketika pemahaman awal peserta berhadapan dengan realitas sosial yang lebih kompleks. Sebagaimana dijelaskan oleh Arends (2020), penyajian masalah yang bersifat terbuka dapat memicu konflik kognitif yang mendorong peserta untuk membangun pemahaman baru yang lebih bermakna.

Proses diskusi dan investigasi kelompok dalam tahapan PBL menjadi ruang penting bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Melalui interaksi tersebut, peserta tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga belajar membandingkan sudut pandang, menguji validitas informasi, serta menyusun argumentasi yang lebih terstruktur. Seiring berjalannya kegiatan, kemampuan peserta dalam menganalisis persoalan sosial menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Peserta mulai mampu membedakan antara fakta dan opini serta tidak lagi mudah terjebak pada stereotip yang bersifat subjektif. Pada tahap ini, ruang pembelajaran berfungsi sebagai media latihan untuk merumuskan solusi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan.

Signifikansi Eksploitasi Isu Multikultural Kelokalan Bali sebagai Kaca Refleksi

Keberhasilan peningkatan capaian pada tahap akhir juga tidak terlepas dari penggunaan konteks sosial budaya yang dekat dengan kehidupan peserta. Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan realitas lingkungan sekitar membuat proses internalisasi nilai menjadi lebih mudah dipahami dan diterima. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk merefleksikan pengalaman sosial yang mereka temui sehari-hari dalam bingkai pembelajaran.

Sejalan dengan pandangan Banks (2019) dan Suparlan (2014), pembelajaran multikultural akan lebih efektif apabila dikaitkan dengan konteks nyata yang dialami peserta didik. Dalam kegiatan ini, berbagai dinamika sosial seperti interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang serta perbedaan latar sosial budaya dijadikan bahan diskusi yang terarah dan edukatif.

Melalui proses tersebut, peserta memperoleh ruang untuk meninjau kembali cara pandang mereka terhadap keberagaman. Diskusi yang dilakukan secara terbimbing membantu peserta memahami bahwa nilai-nilai toleransi dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal tanpa harus menimbulkan sikap diskriminatif. Pada akhirnya, pengalaman belajar yang bersumber dari realitas sosial sekitar peserta terbukti mampu memperkuat pemahaman kebangsaan dan membangun sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penerapan model Problem Based Learning (PBL) yang dipadukan dengan isu-isu multikultural lokal memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan pemahaman toleransi (civic knowledge) peserta didik kelas XI B SMAN 1 Sidemen. Pendekatan pembelajaran yang berbasis pada permasalahan kontekstual mampu menciptakan proses belajar yang lebih aktif, partisipatif, dan mendorong peserta untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (C4–C5) dalam memahami fenomena sosial di sekitarnya.

Hasil pelaksanaan kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan capaian pemahaman secara bertahap dan konsisten. Persentase ketercapaian peserta meningkat dari 43,75% pada kondisi awal, menjadi 68,75% pada tahap pertama, dan mencapai 87,50% pada tahap akhir kegiatan. Capaian ini telah melampaui target keberhasilan program yang ditetapkan sebesar $\geq 80\%$. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi isu sosial budaya lokal dalam pembelajaran berbasis masalah mampu memperkuat pemahaman peserta terhadap nilai-nilai toleransi secara lebih bermakna dan kontekstual.

Secara umum, kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan literasi kewarganegaraan akan lebih efektif apabila dikembangkan melalui pendekatan yang dekat dengan realitas kehidupan peserta didik. Pembelajaran yang mengangkat isu-isu sosial di lingkungan sekitar tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga memperkuat kesadaran sosial, kepekaan terhadap keberagaman, serta kemampuan peserta dalam merespons perbedaan secara lebih bijak dan reflektif.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, direkomendasikan kepada pendidik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk mengembangkan pembelajaran berbasis masalah dengan memanfaatkan isu-isu sosial dan budaya lokal sebagai sumber belajar kontekstual. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik sekaligus memperkuat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kegiatan serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk pendampingan berkelanjutan dengan memperluas fokus pada aspek lain seperti literasi budaya, kemampuan adaptasi sosial, serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi dinamika sosial di ruang digital. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkaya praktik pembelajaran kontekstual yang berorientasi pada penguatan karakter kebangsaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pimpinan dan civitas akademika Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang atas fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Kepala SMAN 1 Sidemen, rekan guru sejawat yang telah bersedia meluangkan waktu bertindak sebagai pengamat (kolaborator), serta terkhusus kepada seluruh peserta didik kelas XI B yang telah berpartisipasi aktif dan antusias selama proses pelaksanaan tindakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, R. I. (2020). *Learning to teach* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Banks, J. A. (2019). *An introduction to multicultural education* (6th ed.). Pearson.
- Branson, M. S. (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. Center for Civic Education.

- Budimansyah, D. (2010). Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. Widya Aksara Press.
- Hidayat, K., & Suryana, Y. (2021). Pendidikan kewarganegaraan dan penguatan karakter toleransi di sekolah menengah. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 150–162.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2020). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.
- Lestari, I., Suyitno, S., & Prasetyo, Z. K. (2023). Implementasi pendidikan multikultural dalam membentuk karakter toleransi siswa SMA. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 123–135.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Sari, M., & Murdiono, M. (2022). Efektivitas problem based learning dalam meningkatkan partisipasi dan interaksi sosial siswa pada pembelajaran PKn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 101–114.
- Setara Institute. (2023). *Indeks kota toleran dan potret intoleransi pelajar Indonesia 2023*. Setara Institute.
- Suparlan. (2014). Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. PKSK.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Grasindo.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Widiatmaka, P., Hidayat, M. Y., Yapandi, Y., & Rahnang. (2022). Pendidikan multikultural dan pembangunan karakter toleransi. *JIPSINDO*, 9(2), 119–133.
- Zuhdi, M., & Haryanto. (2020). Implementasi pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan toleransi siswa SMA. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 27(3), 210–222.